



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1960

TENTANG

PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 13 TAHUN 1960 (LEMBARAN  
NEGARA TAHUN 1960 NO. 35) TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN BANK  
DI INDONESIA MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Pertama tanggal 29 Nopember 1960 No. 25628/1960/R;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;

b. bahwa adalah selaras dengan kepentingan umum, dipandang perlu untuk menambah Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 35) tentang penentuan perusahaan Bank di Indonesia dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Nederlandsche Handel Mij. N.V. di Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5, Tambahan Lembaran-Negara No. 1730) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6, Tambahan Lembaran-Negara No. 1731) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda;

5. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 35) tentang penentuan perusahaan-perusahaan Bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan Perusahaan Bank milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

#### Pasal 1

Perusahaan Bank milik Belanda yang ada diwilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi.

#### Pasal 2

Perusahaan Bank termaksud dalam pasal 1 diatas ialah perusahaan Nederlandsche Handel Mij. N.V. di Indonesia.

#### Pasal 3

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan yang perlu dalam hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, disamping mengambil tindakan-tindakan lainnya bertalian dengan hak dan kewajiban, nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 1960 dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar ...